BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A, Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II dan Pengadilan Agama Martapura Kelas I B telah melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dengan adanya hakim mediator di setiap pengadilan yang mana telah tertera pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (1). Pada proses mediasi itu sendiri, Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A telah melaksanakan prosedur mediasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24, karena adanya kasus sengketa ekonomi syariah, pada Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II baru melaksanakan gugatan sederhana, sedangkan Pengadilan Agama Martapura Kelas I B belum ada kasus sengketa ekonomi syariah yang dilakukan mediasi.
2. Kendala Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A, Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II dan Pengadilan Agama Martapura dalam mengimplementasikan isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) yaitu, lamanya para hakim yang belum bersertifikasi menunggu panggilan

dari Mahkamah Agung untuk mengikuti Diklat hakim mediator. Untuk Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II dan Pengadilan Agama Martapura Kelas I B yaitu belum adanya perkara mengenai sengketa ekonomi syariah, meskipun ada perkara mengenai sengketa ekonomi syariah seperti yang terdapat pada Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II, perkara tersebut hanyalah gugatan sederhana yang mana tidak diperlukan mediasi dan langsung diputuskan oleh hakim pemeriksa perkara saja.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan pihak yang berwenang terutama Mahkamah Agung, agar dapat melakukan diklat hakim mediator secara rutin dan terjadwal agar tidak ada penumpukan antrian bagi para hakim yang ingin mendapatkan sertifikasi hakim mediator.
2. Diharapkan pihak yang berwenang terutama Pengadilan Agama untuk meningkatkan sosialisasi mengenai PERMA Nomor 1 tahun 2016 terhadap sengketa ekonomi syariah kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui bahwasanya ada wadah yang dapat memfasilitasi masalah yang terkait sengketa ekonomi syariah.
3. Pengadilan Agama terus meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi mengenai hakim mediator yang bersertifikasi sebagai hakim mediator sekaligus meningkatkan fasilitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

4. Kepada peneliti berikutnya agar melakukan pengkajian-pengkajian yang lebih komprehensif karena masih banyak persoalan yang dikaji secara akademis, terutama terkait dengan sengketa ekonomi syariah.